

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Peran

##### a. Defisini Peran

Pengertian peran menurut Soerjono dalam Syaron, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson dalam Syaron peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.<sup>1</sup>

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.<sup>2</sup> Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

---

<sup>1</sup> Syaron Brigitte Lantaeda Dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 No. 048, 2017. 1.

<sup>2</sup> Syaron Brigitte Lantaeda Dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon".

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto dalam Syaron, mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dalam Syaron peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Syaron Brigitte Lantaeda Dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 No. 048, 2017. 2-3.

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>4</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

## 2. Pengembangan Masyarakat Islam

### a. Definisi Pengembangan Masyarakat Islam

Pengembangan masyarakat Islam (*Islamic Community Development*) merupakan sebuah bentuk dakwah dengan sasaran semakin terberdayakan potensi- potensi yang ada di masyarakat. Secara implementatif untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan teoritik yang mapan, sebuah perangkat konseptual dan operasional yang dapat diaplikasikan. Pertama sasaran pengembangan perlu diperjelas, apa saja faktor-faktor yang ada di masyarakat dan dipandang mampu mengangkat

---

<sup>4</sup> Syaron Brigitte Lantaeda Dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 No. 048, 2017. 3

kualitas kehidupan dan kesejahteraan, setelah itu apa strateginya, pelakunya harus siapa, bagaimana pencapaiannya serta apa saja yang dibutuhkan untuk memperlancar pencapaian itu.

Jika menilik pada perangkat mekanis dan teknis dari pengembangan ini, maka tampaknya program ini diakui masih perlu usaha dan kerja keras para ahli, peneliti dan ilmuan di bidang relevan untuk melakukan kajian-kajian yang bersifat intensif terutama dengan memanfaatkan teori-teori yang sudah banyak berkembang pada disiplin ilmu sosial lain (melakukan *Iqtibas*). Misalnya ada banyak ilmu yang relevan dari ilmu-ilmu dasar seperti sosiologi dan psikologi maupun ilmu sosial lain seperti ekonomi, politik dan humaniora.

Hal ini dikarenakan, yang menjadi tujuan dari pengembangan masyarakat adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang di dalam menciptakan demokrasi, pada masyarakat, yaitu masyarakat mampu mengusahakan dan menciptakan fasilitas ketika terjadi pengambilan keputusan. Upaya tersebut menuntut pembentukan proses yang memungkinkan sebuah masyarakat memiliki akses terhadap sumberdaya, mampu mengontrol sumberdaya dan struktur kekuasaan di masyarakat.<sup>5</sup>

Sedangkan apabila menilik pada asal muasal lahirnya bidang ini (pengembangan masyarakat Islam), tidak bisa dipisahkan dengan dakwah. Dakwah memiliki sasaran yang beragam bukan hanya dari jenis perkembangan masalah yang terjadi pada lingkup individual akan tetapi juga membidikan sasarannya pada masyarakat secara umum, bahkan dalam perkembangannya ilmu dakwah menjelaskan adanya 6 konteks sasaran/ *mad'u* yang digarap oleh dakwah yaitu dari mulai diri sendiri (*da'wah an-nafsiyah*), antar perseorangan (*da'wah al-fardiyyah*), sasaran kelompok (*da'wah al-fi'ah*), organisasi

---

<sup>5</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, (Jakarta: Prenada Media), 2013, 3.

(*da'wah al-hijbiyah*), antar etnik (*da'wah as-syu'ubiyah wa qobailiyyah*), komunitas massal (*da'wah al-ummah*). Dengan demikian pengembangan masyarakat Islam termasuk di dalamnya dan bentuk dakwah ini dinamakan juga dengan at-takwir.<sup>6</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya).<sup>7</sup> Pengembangan juga dapat diartikan pemberdayaan dalam konteks sosial, karena pemberdayaan merupakan proses pengembangan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemauan bertindak, dan kemudian ada kata “berdaya” yang berasal dari kata “ber-daya” yang artinya berkekuatan atau berkemampuan, sedangkan pemberdayaan berasal dari kata “pem-ber-daya-an” yang berarti suatu proses, cara atau perbuatan memberdayakan.<sup>8</sup> Pemberdayaan masyarakat bisa dipahami atau diartikan sebagai proses mengembangkan, menswadayakan, memandirikan dan memperkuat posisi masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan penekanan di segala bidang dan sektor yang merubah kehidupan agar lebih sejahtera. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau

---

<sup>6</sup> Mukhlis Aliyudin, "Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Sistem Dakwah Islamiyah", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4 No. 14 Juli-Desember 2009, 779-780.

<sup>7</sup> KBBI Online, diakses pada tanggal 27 februari, pukul 21.55 WIB. <https://kbbi.web.id/pengembangan>.

<sup>8</sup> KBBI Online, diakses pada tanggal 27 februari, pukul 21.55 WIB. <https://kbbi.web.id/daya>.

kemampuan dan proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>9</sup>

Menurut beberapa para ahli yang mendefinisikan atau mengartikan kata “pemberdayaan” dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut Nur Khoirin, menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu aksi, oleh karena itu membantu menyusun kembali dalam kekuatan didalam komunitas.<sup>10</sup>
- 2) Menurut Rasyid, menyatakan bahwa pemberdayaan adalah tugas pokok dari pemerintah, disamping dua tugas lainnya yaitu pelayanan (*service*) dan pengaturan (*regulatory*).<sup>11</sup>
- 3) Menurut Soetomo, menyatakan bahwa pengertian pemberdayaan dalam pembangunan, *power* dalam dimensi generatif justru lebih penting. Suatu kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* dengan mengurangi *power* kelompok lain. Kelompok yang bersifat *powerless* akan memperoleh tambahan *power* atau *empowerment*, hanya dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholders*.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Dedy Wahyu Hernanda, “pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Wisata Syari’ah (Halal Tourism) di Pulau Santen Banyuwangi” e-ISSN 2598-1064, 27.

<sup>10</sup> Nur Khoirin YD, dkk, *Pemberdayaan Petani Kebun Pisang di Lahan Kosong Sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 47.

<sup>11</sup> Sutrisno, “Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati” *Jurnal Bina Praja*, Vol.7 No.1 (2015): 68.

<sup>12</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 88-89.

- 4) Menurut Pricillia Azhani, menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses yang terjadi antara individu dengan lingkungannya, adanya perubahan rasa tidak berdaya berubah pada penerimaan diri sebagai warga negara yang memiliki kemampuan sosial.<sup>13</sup>
- 5) Menurut Jim Ife, menyatakan bahwa pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kepastian masyarakat, sehingga masyarakat bisa menemukan masa depan yang lebih baik.<sup>14</sup>
- 6) Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari *rekayasa* pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses membuat program pada suatu daerah atau wilayah yang perlu diberdayakan agar mampu meningkatkan perekonomian dalam masyarakat dan program untuk menyejahterakan masyarakat yang mempunyai

---

<sup>13</sup> Pricillia Azhani, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekowisata Mangrove (Suatu Kajian di Kawasan Hutan Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Pantai Timur Surabaya)" *Jurnal Bumi Lestari*, Vol.19 No.1 (2019): 21.

<sup>14</sup> Mubasyaroh, "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.1 No.1 (2016): 60.

<sup>15</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 100.

potensi pada sumber daya alam tapi belum bisa menggunakannya. Tugas pemberdayaan pada hakikatnya diarahkan pada terwujudnya sebuah komunitas masyarakat yang berdaya dan mandiri yang mampu berperan sebagai mitra dari pemerintah dalam pembangunan. Dengan pengertian lain, adalah sebuah masyarakat yang mampu berperan sebagai subyek dalam pembangunan di desa, tidak sebagai obyek dari pembangunan seperti yang terjadi selama ini.<sup>16</sup>

Sedangkan dari kata masyarakat berarti sekumpulan orang yang berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi.<sup>17</sup> Menurut Mulyana dari jurnal yang ditulis oleh Sutrisno menyatakan bahwa partisipasi atau peran masyarakat dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Adanya subyek yang berinteraksi yaitu individu yang berada dalam suatu unit masyarakat (kelompok), pemerintah, organisasi perekonomian dan bangsa. Masing-masing memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan sendiri-sendiri tetapi terikat dalam suatu ikatan solidaritas tertentu untuk mewujudkan kepentingan atau rencana yang akan dicapai bersama.
- 2) Adanya rasa suka rela dan kesadaran dari individu untuk menjalankan peran yang diberikan oleh kelompok secara ikhlas. Dalam ikut serta tidak atas dasar kekuasaan pemimpin (formal).
- 3) Partisipasi berkonotasi kepada keterlibatan anggota perorangan dalam proses pengelolaan suatu kegiatan (pengambilan keputusan bersama,

---

<sup>16</sup> Sutrisno, "Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati" *Jurnal Bina Praja*, Vol.7 No.1 (2015): 68.

<sup>17</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 25.

pengarahan, sumber daya, pengawasan dan penyesuaian).<sup>18</sup>

Selanjutnya, pengertian pemberdayaan masyarakat ada beberapa dari para ahli, menurut Prijono dan Pranaka dari jurnal yang ditulis oleh Wiwik dan M. Farid Ma'ruf menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>19</sup>

Menurut Munawar Noor, pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*.<sup>20</sup> Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai strategi alternatif pembangunan yang telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran, walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan masyarakat tergantung atas pilihan dalam bidang kesejahteraan sosial yang diharapkan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan bidang pendidikan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bertujuan agar masyarakat yang diberdayakan menyadari potensi, kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri sendiri guna

---

<sup>18</sup> Sutrisno, "Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati" *Jurnal Bina Praja*, Vol.7 No.1 (2015): 70.

<sup>19</sup> Wiwik dan M. Farid Ma'ruf, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban" *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.4 No.7 (2016): 2.

<sup>20</sup> Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol.1 No.2 (2011): 88.

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.<sup>21</sup> Tujuan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk bisa mewujudkan impian dan meningkatkan perekonomian dalam masyarakat, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*), untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, memperbaiki materi, memperbaiki metoda, memperbaiki yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), untuk tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, untuk memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan lembaga pemasaran.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*), untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang ada di masyarakat supaya semakin lebih baik.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*), untuk memperbaiki kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.
- 5) Perbaikan usaha (*better business*), untuk memperbaiki pendidikan, aksesibilitas, kegiatan dan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*), untuk memperbaiki pendapatan dalam hal perekonomian yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*), untuk memperbaiki lingkungan, karena

---

<sup>21</sup> Mubasyaroh, "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.1 No.1 (2016): 60-61.

kerusakan lingkungan sering menjadi penyebab kemiskinan atau pendapatan terbatas.

- 8) Perbaiki kehidupan (*better living*), untuk memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 9) Perbaiki masyarakat (*better community*), untuk mewujudkan masyarakat lebih baik dan mewujudkan kehidupan masyarakat lebih baik.<sup>22</sup>

### c. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Tuwo Ambo, kurangnya pemberdayaan masyarakat antara lain disebabkan oleh keterbatasan masyarakat dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal dan kelembagaan usaha. Kalau masyarakat mengingatkan perubahan, maka pemberdayaan masyarakat harus melakukan lima pendekatan ini dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan dan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Kelima pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan mata pencaharian alternatif, dilakukan dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi yang ada di tempat yang akan diberdayakan.
- 2) Akses terhadap modal, dalam pemberdayaan masyarakat sangat memerlukan strategi, dan strategi itu berupa pengembangan akses modal. Strategi ini sangatlah penting karena pada dasarnya memperoleh modal sangatlah sulit.
- 3) Akses terhadap teknologi, upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi yang belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat.
- 4) Akses terhadap pasar, pasar adalah faktor yang bisa dikatakan menjadi salah satu kendala utama

---

<sup>22</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 111-112.

bila pasar tidak berkembang. Karena itu membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha.

- 5) Pengembangan aksi kolektif, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan aksi kolektif mempunyai arti sama dengan halnya pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama.<sup>23</sup>

#### **d. Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat, sehingga masyarakat yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, perlu adanya konsep perekonomian berjalan dengan lancar, maka aspirasi masyarakat harus tertuang dalam rumusan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat.<sup>24</sup> Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat dan pemerintah. Adapun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Memberikan penyadaran kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat yang perlu diberdayakan.
- 2) Memberikan motivasi kepada masyarakat yang perlu diberdayakan.
- 3) Mengembangkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan keterampilan.
- 4) Menciptakan peluang usaha mandiri untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam penyaluran hasil produksi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wiwik dan M. Farid Ma'ruf, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban" *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.4 No.7 (2016): 5-6.

<sup>24</sup> Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol.1 No.2 (2011): 89.

<sup>25</sup> Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembang Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa

#### e. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Kunci pertama dari keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah apabila dapat mendorong lahirnya aktivitas lokal atau kegiatan-kegiatan di masyarakat.<sup>26</sup> Pemberdayaan masyarakat juga sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.<sup>27</sup> Maka dari itu, perlu adanya tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tahap yang lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat dan pemerintah. Adapun tahap-tahap dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat dan membantu membuat program atau sebuah organisasi, sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan, pada tahap persiapan ini terhadap dua kegiatan yang perlu dilakukan adalah penyiapan petugas dan penentuan lokasi program.
- 2) Tahap *assesment*, pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) dan sumber daya yang dimiliki oleh warga masyarakat.
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini pengelola program berusaha memfasilitasi warga masyarakat untuk menyusun perencanaan dan menetapkan program-program kerja yang harus dilakukan.
- 4) Tahap formulasi rencana aksi, tahap ini yang akan dilakukan adalah agen perubahan membantu membimbing warga atau kelompok untuk

---

Kaliwlingi, Brebes” *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol.7 No.3 (2018): 300.

<sup>26</sup> Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 49.

<sup>27</sup> Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat” *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol.1 No.2 (2011): 88.

menyusun proposal kegiatan yang akan diajukan kepada pihak penyandang dana.

- 5) Tahap pelaksanaan program, tahap ini mengimplementasi program yaitu tahap yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar.
- 6) Tahap evaluasi, tahap ini perlu dilakukan pada semua program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui suatu tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan.
- 7) Tahap terminasi, tahap ini adalah tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Tahap terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya.<sup>28</sup>

#### **f. Teknik, Metode dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Teknik dan metode yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat sebagian besar dengan metode praktek dan diselingi oleh teori. Metode praktek yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keterampilan. Dalam pelaksanaannya, metode praktek memang dinilai sangat efektif. Hal ini dikarenakan dengan metode praktek, masyarakat lebih menerima materi dibandingkan dengan metode ceramah yang hanya memberikan pemahaman teori saja.<sup>29</sup>

Pemberdayaan masyarakat untuk menjangkau masyarakat luas perlu menggunakan teknik pendekatan lapangan, antara lain yaitu:

---

<sup>28</sup> Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 10-11.

<sup>29</sup> Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes" *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol.7 No.3 (2018): 301.

- 1) *Participatori Rural Appraisal* (PRA), teknik ini merupakan kelanjutan dari RRA yang mengemas metode-metode pengembangan masyarakat menjadi bagian dari metodenya.
- 2) *Achievement Motivation Training* (ATM), adalah yang memberi latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa yang memperhatikan tiga aspek domain, yaitu *achievement*, *power*, dan *psikomotorik*.
- 3) *Action-Research* yaitu sebuah teknik untuk menyadarkan masyarakat terhadap potensi dan masalah yang ada pada masyarakat.
- 4) *Participatory Action Research* yaitu teknik penyadaran masyarakat terhadap potensi dan masalah yang dimiliki untuk menekankan pada keikutsertaan masyarakat pada kegiatan yang dilaksanakan.
- 5) *Why tree* dan *problem tree* adalah teknik perencanaan dan evaluasi yang mempergunakan struktur analisis jaringan seperti pohon. Teknik ini antara lain *problem tree*, *solution tree* dan sebagainya.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa metode pemberdayaan masyarakat partisipatif, antara lain sebagai berikut:

- 1) Metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas. Metode RRA pada dasarnya merupakan proses belajar intensif untuk memahami kondisi masyarakat, dilakukan berulang-ulang dan cepat, menggunakan metode, cara dan pemilihan teknik tertentu untuk meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat. Metode tersebut dipusatkan pada pemahaman tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

---

<sup>30</sup> Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 70.

- 2) Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), metode ini pada dasarnya merupakan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan dengan memberikan tekanan pada partisipasi dengan prinsip dengan cara belajar dari masyarakat, orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku, saling belajar dan saling berbagi pengalaman, keterlibatan semua kelompok masyarakat, bebas dan informal, menghargai perbedaan dan triangulasi. Metode PRA dibangun berdasarkan kemampuan masyarakat setempat, penggunaan teknik-teknik fasilitatif dan partisipatoris, dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam prosesnya.<sup>31</sup>
- 3) Metode *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok yang terarah, suatu metode pengumpulan data, pada dasarnya FGD adalah interaksi individu-individu sekitar 10 sampai 30 orang yang tidak saling mengenal dan oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang diikuti dan dicermatinya.
- 4) Metode *Participatory Learning and Action* (PLA) atau proses belajar dan praktek secara partisipatif, metode PLA adalah bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai “*learning by doing*” atau belajar sambil berkerja. Secara singkat, PLA adalah metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik. Dan segera diikuti aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut.
- 5) Metode *Farmers Field School* (FFs) atau Sekolah Lapangan (SL), metode pemberdayaan masyarakat SL/FFs adalah kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok

---

<sup>31</sup> Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat” *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol.1 No.2 (2011): 97.

masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan pendapat, berbagi pengalaman, tentang alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

- 6) Pelatihan Partisipatif, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat harus diawali dengan “*scoping*” atau penelusuran tentang program pendidikan yang diperlukan dan analisis kebutuhan atau “*need assesment*”. Setelah itu menyusun program atau acara pemberdayaan masyarakat yang dalam pendidikan formal disebut dengan silabus dan kurikulum, perumusan modul atau lembar persiapan fasilitator pada setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.<sup>32</sup>

Strategi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat tahu tentang teknologi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dengan mengadakan program-program pelatihan mengingat sumber daya alam yang melimpah, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar dapat mengelola sumber daya alam secara bijaksana.

Menurut Florentina Ratih Wulandari, mengatakan strategi pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan dengan strategi pembangunan yang memanfaatkan modal sosial masyarakat, khususnya rasa saling memiliki masa depan bersama dan bekerja sama sehingga mengoptimalkan kualitas dan kuantitas jaringan, komunikasi, inisiatif, inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan serta kelestarian lingkungan hayati.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 71-72.

<sup>33</sup> Nisita Prabawati, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembang Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa

### g. Peran Lembaga dan Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mulyana, partisipasi atau peran dari masyarakat agar dapat mengambil keputusan yang diinginkan oleh masyarakat untuk mewujudkan kepentingan atau rencana bersama. Adanya kerelaan dan kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan peran dalam organisasi secara ikhlas.<sup>34</sup> Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat, maka dari itu selain adanya peran dari masyarakat perlu adanya peran dari lembaga dan peran pendamping dari pemerintah. Beberapa peran lembaga dan pendamping yang terkait, adalah:

- 1) Peran pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan *instrument* peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.
- 2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal.
- 3) Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya.
- 4) Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan membangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.
- 5) Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya.

---

Kaliwlingi, Brebes” *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol.7 No.3 (2018): 301.

<sup>34</sup> Sutrisno, “Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati” *Jurnal Bina Praja*, Vol.7 No.1 (2015): 70.

- 6) Pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai *bottom-up*.
- 7) Keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya di dunia usaha dan swasta.<sup>35</sup>

#### **h. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Kegagalan dalam pemberdayaan masyarakat dikarenakan nilai-nilai normatif yang setidaknya diimplementasikan dalam kegiatan yang tidak berjalan. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang tidak berdampak apa-apa, karena adanya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai yang melandasi pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Kejujuran (*Transparansi*), nilai ini secara empirik sangat penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena integritas moral semua yang terlibat dalam kegiatan yang berada pada ranah yang tinggi, nilai kejujuran harus melekat pada setiap insan-insan yang mengelola atau terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Keadilan, nilai ini berarti bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut memberikan peluang yang sama kepada seluruh kelompok sasaran baik dalam mendapatkan bantuan teknis maupun penguatan kepastiannya. Adil dan merata adalah nilai yang perlu ditanamkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kepercayaan (*Trust*), nilai ini berarti bahwa pelaksana maupun kelompok sasaran yang akan diberdayakan dan dapat dipercaya untuk turut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saling percaya antara keduanya juga penting dalam membangun kesepemahaman dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam

---

<sup>35</sup> Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol.1 No.2 (2011): 97-98.

program tersebut. Kepercayaan ini sebagai mana diungkapkan Francis Fukuyama, yaitu nilai atau modal sosial yang dapat memperkuat perusahaan-perusahaan di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan lainnya).

- 4) Kebersamaan dan saling tolong menolong, nilai ini berarti pemberdayaan masyarakat memerlukan kebersamaan dan saling tolong menolong dari mereka yang terlibat dalam pengembangan masyarakat lainnya. Melalui kebersamaan kompleksitas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat akan terasa ringan dan mudah untuk dilaksanakan.
- 5) Kepedulian, berarti komitmen yang tinggi dari anggota masyarakat yang lain untuk secara sadar berbagai dengan anggota masyarakat yang lainnya. Berbagai dalam kaitannya dapat berupa material maupun imaterial.
- 6) Berorientasi, pengembangan masyarakat Islam menitikberatkan pada orientasi masa depan, yaitu apa yang dilaksanakan tersebut memiliki nilai kesinambungan bagi pengembangan masyarakat di masa depan.<sup>36</sup>

Pemberdayaan masyarakat dengan adanya rasa tanggung jawab dan terjalinnya kerja sama dan rasa percaya antar masyarakat. Rasa tanggung jawab dan terjalinnya kerja sama tersebut akan meningkatkan kualitas masyarakat dalam melakukan kegiatan. Setelah, mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka akan memiliki solidaritas yang tinggi.<sup>37</sup> Dengan adanya rasa tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya

---

<sup>36</sup> Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 19-21.

<sup>37</sup> Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes" *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol.7 No.3 (2018): 303.

prinsip-prinsip yang mendasari dari pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, antara lain yaitu:

- 1) Minat dan kebutuhan, yaitu pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengetahui hal tersebut, apa saja yang menjadi minat dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi sesuai sumber daya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi lebih dahulu.
- 2) Organisasi masyarakat bawah, yaitu pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah, dari setiap keluarga atau kekerabatan.
- 3) Keragaman budaya, yaitu pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
- 4) Perubahan budaya, yaitu pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
- 5) Belajar sambil bekerja, yaitu pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang dikerjakan.
- 6) Penggunaan metoda yang sesuai, yaitu pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial-budaya dengan sarannya.<sup>38</sup>
- 7) Partisipasi, masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan

---

<sup>38</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 106-107.

pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.

- 8) Kesetaraan dan keadilan gender, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil dan bermanfaat dalam kegiatan pembangunan.
- 9) Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.<sup>39</sup>
- 10) Kepemimpinan, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan atau kepuasan sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaan.
- 11) Spesialis yang terlatih, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan-kegiatan khusus akan lebih efektif dibanding yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan.
- 12) Segenap keluarga, yaitu penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.
- 13) Kepuasan, yaitu pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan

---

<sup>39</sup> Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 21-22.

sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.<sup>40</sup>

- 14) Transparansi dan Akuntabel, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung gugatkan baik secara moral, teknis, legal maupun *administrative*.
- 15) Keberlanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini, tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.<sup>41</sup>

#### **i. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangku sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat.<sup>42</sup>

Menurut Shofwan dkk, kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai kebijakan strategi diharapkan dapat membawa kemakmuran rakyat, mengembangkan harkat dan martabat masyarakat serta mampu mensejajarkan diri dengan masyarakat lain. Kebijakan dibangun

---

<sup>40</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 107-108.

<sup>41</sup> Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 22.

<sup>42</sup> Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol.1 No.2 (2011): 89-90.

berdasarkan asas partisipatif dan diarahkan sebagai penerima manfaat terbesar.<sup>43</sup> Berangkat dari konsep ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”.
- 2) Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa da kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”.
- 3) Mencermati kedua rumusan Kebijakan Pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah”.
- 4) Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa “tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan

---

<sup>43</sup> Wiwik dan M. Farid Ma’ruf, “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban” *Jurnal Ilmu Adminitrasi Negara*, Vol.4 No.7 (2016): 2.

lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, meningkatkan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.

- 5) Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaa masyarakat, Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat.<sup>44</sup>

### 3. Budaya Tradisional

#### a. Pengertian Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebudayaan berasal dari kata ke·bu·da·ya·an hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.<sup>45</sup> Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata latin colere yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia.<sup>46</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kuntjaraningrat bahwa “kebudayaan” berasal dari kata sansekerta buddhayah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari

---

<sup>44</sup> Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat” *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol.1 No.2 (2011): 90.

<sup>45</sup> kbbi

<sup>46</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 9.

majemuk budi- daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal<sup>2</sup>. Kuntjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma- norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia.<sup>47</sup>

Seorang ahli bernama Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari- hari : “kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan”.<sup>48</sup>

Jadi kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan, istilah ini meliputi cara- cara berlaku, kepercayaan- kepercayaan dan sikap- sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Selain tokoh diatas ada beberapa tokoh antropologi yang mempunyai pendapat berbeda tentang arti dari budaya ( Culture).

Sementara Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, 5.

<sup>48</sup> Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 151.

<sup>49</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*, (Bogor : GHalia Indonesia), 2006, 21.

## b. Unsur-Unsur Budaya

Beberapa tokoh antropolog meutarakan pendapatnya tentang unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan, Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok dalam kebudayaan yang meliputi:

- 1) Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
- 2) Organisasi ekonomi
- 3) Alat- alat dan lembaga atau petugas- petugas untuk pendidikan
- 4) Organisasi kekuatan politik.<sup>50</sup>

Sementara itu Melville J. Herkovits mengajukan unsur-unsur kebudayaan yang terangkum dalam empat unsur:

- 1) Alat-alat teknologi
- 2) Sistem Ekonomi
- 3) Keluarga Kekuasaan politik.<sup>51</sup>

Sementara Kluckhon dalam bukunya yang berjudul *Universal Categories of Culture* membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhon membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal.

Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah :<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*, 22.

<sup>51</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*, 21.

<sup>52</sup> Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 160-165.

### 1) Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

### 2) Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh- tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.

### 3) Sistem Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui

berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkat-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

4) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

5) Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

6) Sistem Religi

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang

dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut.

Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

#### 7) Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.

#### c. Ekspansi Budaya Tradisional

Keanekaragaman suku, bahasa, adat dan kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Kekayaan budaya tersebut menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulang kali memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui budaya tradisional di Indonesia sebagai milik mereka.

Klaim negara lain terhadap budaya tradisional Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional karena semakin lama akan semakin banyak budaya tradisional Indonesia yang diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mendapat keuntungan dari karya intelektual warisan budaya Indonesia tersebut. Sebagai suatu karya intelektual, karya seni dan budaya tradisional sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektualnya.

Hak kekayaan intelektual merupakan satu bentuk hasil berpikir manusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah ciptaan atau temuan. Hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah untuk mengontrol apa-apa yang diciptakannya.<sup>53</sup>

Hak kekayaan intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Karya tersebut di dalamnya terdapat unsur pembangunan yang berasal dari akal, dan dengan ini manusia dapat mengembangkan dan memanfaatkannya guna kesejahteraan hidupnya. Hak kekayaan intelektual dapat memberikan manfaat ekonomi apabila temuan atau ciptaan tersebut digunakan oleh orang lain dalam aktivitas yang bersifat komersial.

Dari perspektif hak kekayaan intelektual, instrumen perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia menggunakan rezim hak cipta. Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak kekayaan intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum hak kekayaan intelektual. Hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan

---

<sup>53</sup> Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia, 14.

yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>54</sup>

#### d. Dasar Hukum Budaya Tradisional

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal pemegang Hak Cipta, yakni:

ayat (1) “Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya”; ayat (2) “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.” Selanjutnya Penjelasan undang-undang tersebut memberikan definisi folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk: 1. cerita rakyat, puisi rakyat, 2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, 3. tarian-tarian rakyat, permainan tradisional, 4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Dalam Pasal 12 ditegaskan pula bahwa karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan

---

<sup>54</sup> Bayangsari Wedhatami1, Budi Santoso, "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah", UNDIP, 33.

dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; dan sinematografi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, masih belum terfokus bagaimana konsep perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional.

Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; ...; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>55</sup>

Hal serupa juga berlaku bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola potensi ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan

---

<sup>55</sup> Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah", 38

tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.<sup>56</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q menyebutkan bahwa urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang urusan kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan.<sup>57</sup>

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya untuk sub bidang kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan bidang kebudayaan yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam angka 2 adalah perlindungan Hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang kebudayaan. Pemerintah daerah provinsi memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Oleh sebab itu, pada tingkat daerah juga diperlukan peraturan hukum

---

<sup>56</sup> Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah", 39

<sup>57</sup> Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah", 40

yang mengatur tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional di daerah sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan.<sup>58</sup>

#### 4. Kesenian Tradisional Wayang Kulit

##### a. Definisi Kesenian Tradisional

Kesenian dapat diartikan sebagai hasil karya manusia yang mengandung keindahan dan dapat diekspresikan melalui suara, gerak ataupun ekspresi lainnya. Kesenian memiliki banyak jenis dilihat dari cara/media penyampaianya antara lain seni suara (vokal), lukis, tari, drama dan patung. Bila dilihat dari perkembangannya ada yang dikenal sebagai seni tradisional yaitu seni yang lahir dan berkembang secara alami di masyarakat tertentu dan kadangkala masih tunduk pada aturan-aturan yang baku, namun ada juga yang sudah tidak terikat aturan, kesenian ini merupakan bagian dari kesenian rakyat yang bisa di nikmati secara massal.<sup>59</sup>

Dalam proses pertumbuhannya, kesenian tradisional yang merupakan bagian dari kesenian rakyat diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan Yoety

“Kesenian tradisional adalah kesenian yang sejak lama turun temurun hidup dan berkembang pada suatu daerah, masyarakat etnik tertentu yang perwujudannya mempunyai peranan tertentu dalam masyarakat pendukungnya”<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah", 41

<sup>59</sup> Rikza Fauzan, Nashar “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang)", *Jurnal Candrasangkala*, Vol 3 No.1 Tahun 2017, 1.

<sup>60</sup> Rikza Fauzan, Nashar “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang)", 1.

Kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di suatu lokalitas didukung oleh masyarakat yang terikat pada aturan adat yang disepakati, telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbeda dengan kesenian modern yang cenderung lebih mudah berubah mengadopsi unsur-unsur luar, kesenian tradisional lebih cenderung lambat mengalami perubahan. Hal ini menurut Khayam, dikarenakan secara umum kesenian tradisional ini memiliki ciri sebagai berikut : Pertama, ia memiliki jangkauan terbatas pada lingkungan kultur yang menunjangnya. Kedua, ia merupakan pencerminan dari suatu kultur yang berkembang secara perlahan, karena dinamika masyarakat yang menunjangnya memang demikian. Ketiga, ia tidak terbagi-bagi pada pengkotakkan spesialisasi. Keempat, ia bukan merupakan hasil kreativitas individu-individu tapi tercipta secara anonim bersama dengan sifat kolektivitas masyarakat yang menunjangnya.

Ciri-ciri tersebut memperkuat pernyataan bahwa seni tradisi merupakan identitas budaya dari suatu masyarakat tertentu, sebab seni tradisi sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat di suatu lingkungan dan bukan merupakan seni yang menonjolkan seniman atas nama diri sendiri, tapi lebih merupakan perwakilan dari sistem sosial atau sikap kelompok masyarakat.

#### **b. Wayang Kulit**

Seni pewayangan merupakan kesenian yang tumbuh dan berkembang di Jawa sejak zaman prasejarah. Keberadaan wayang di Jawa hingga sekarang menunjukkan tetap digemari di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Wayang sebagai kesenian tradisional mampu bertahan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan segala aspek perubahan-perubahannya. Pada zaman modern wayang tidak lantas tersingkirkan dalam perhelatan panggung hiburan. Wayang mampu bertahan dan menjadi kesenian yang masih favorit

masyarakat dengan berbagai inovasi dan eksperimen yang dilakukan oleh para seniman wayang.

Dengan berbagai inovasi wayang menjadi hiburan rakyat yang atraktif, seandainya wayang kalah dalam berkompetisi merebutkan panggung hiburan, wayang sudah mati dan tidak dikenal lagi dari dulu. Fakta realitasnya wayang masih subur hingga saat ini. Apabila dibandingkan dengan kesenian lainnya wayang memang wantek (tangguh) dan sudah balung sungsum (mengakar) dalam masyarakat pendukungnya. Sehingga wayang menjadi hiburan masyarakat nomor satu. Setiap ada pagelaran wayang masyarakat berduyun-duyun menonton wayang. Masyarakat rela menonton wayang sampai semalam suntuk.

Kemampuan wayang bertahan dari generasi ke generasi merupakan suatu prestasi yang patut diapresiasi. Kemampuan wayang tetap eksis di tengah gempuran modernisasi. Secara sosiokultural wayang menyesuaikan dengan perkembangan di masyarakat. Dalam pewangyan yang diberi "warna" sebagaimana yang dijumpai dewasa ini, yaitu: lawakan, campursari, sampai dangdut. Hal tersebut untuk mengimbangi perubahan-perubahan dalam masyarakat.<sup>61</sup>

Ketradisional dalam wayang tidak membuat seni pewayangan meredup dan tercerabut dari akarnya. Tidak dipungkiri dengan kemajuan banyak generasi muda yang tidak paham dengan wayang bahkan tidak mau menonton wayang. Secara psikologis wayang menempel kuat dalam benak masyarakat yang tidak mudah dihapus dari ingatan.

### c. Sejarah Wayang Kulit

Secara historis penelusuran jejak sejarah wayang ditemukan suatu indikasi yang menyatakan bahwa wayang sudah ada sejak 1500 SM. Indikasinya wayang pada zaman tersebut difungsikan sebagai medium

---

<sup>61</sup> Fatkur Rohman Nur Awal, "Sejarah Perkembangan Dan Perubahan Fungsi Wayang Dalam Masyarakat (History Of Development And Change Of Wayang Functions In Society)" *Jurnal Kebudayaan*, Volume 13, Nomor 1, Agustus 2018, 77.

untuk mendatangkan arwah leluhur. Kepercayaan terhadap arwah leluhur berkorelasi dengan sistem kepercayaan masyarakat Jawa zaman prasejarah, di mana masyarakat pada zaman tersebut melakukan ritual penyembahan kepada arwah leluhur atau nenek-moyang atau kepercayaan kepada hyang, selanjutnya dinamakan pergelaran wayang. Wayang pada masa itu digunakan sebagai media pemujaan kepada arwah leluhur, dengan sebutan hyang atau dahyang. Apabila berkomunikasi dengan roh-roh itu, masyarakat Jawa memerlukan bantuan seorang syaman. Proses ini merupakan cikal bakal dari sejarah wayang yang berasal dari kata hyang, kemudian disebut wayang dan syaman adalah dalang.<sup>62</sup>

Dari kepercayaan arwah leluhur mengilhami timbulnya cara bagaimana membuat wayang, yaitu gambar bayangan para leluhur yang sudah meninggal. Gambar bayangan tersebut pada perkembangannya berdasarkan peradaban manusia dinamakan wayang. Penegasan paradigma makna wayang adalah bayangan. Makna wayang sebagai bayangan mengalami perubahan makna seiring perkembangan dalam masyarakat. Wayang tidak lagi dimaknai sebagai bayangan namun wayang dimaknai sebagai pertunjukan panggung atau teater.

Pada dasarnya pertunjukan wayang adalah sisa-sisa upacara keagamaan orang Jawa kuno, yang pada saat itu masih menganut kepercayaan kepada arwah leluhur. Pada masa itu para pendahulu kita telah membuat alat-alat pemujaan berupa arca sebagai media untuk memanggil roh-roh atau arwah nenek moyang yang dinamakan hyang.

Pemaknaan wayang sebagai pertunjukan panggung atau teater berkorelasi dengan puncak kesenian pewayangan di Jawa, yakni pada tahun 907 Masehi dan abad XI. Pergelaran wayang dipergelarkan dan

---

<sup>62</sup> Fatkur Rohman Nur Awal, "Sejarah Perkembangan Dan Perubahan Fungsi Wayang Dalam Masyarakat (History Of Development And Change Of Wayang Functions In Society)" 78.

menjadi daya tarik bagi yang menontonnya. Pokok pergelaran wayang sifatnya masih magis-religius. Alat-alat pendukung yang digunakan masih sederhana dan gendhing- gendhing yang mengiringi masih bernuansa Hindu.

Pemvisualisasian pertunjukan atau pergelaran wayang terdapat dalam kakawin “Arjuna- Wiwaha” karya Mpu Kanwa, Prabu Airlangga 1030 Masehi. Ditulis dalam pupuh (bait) Cikharini pupuh kaping 9 :

“Hanonton ringgit manangis asekel mudha hidhepan huwus wruh tuwin yan walulang inukir molah angucap hatur ning wang tresneng wisaya malaha ta wihikana ri tatwa nyan maya sahana-hana ning bawa siluman”.<sup>63</sup>

Artinya:

“Ada orang menonton atau melihat wayang menangis, kagum, sedih hatinya. walaupun sudah mengerti bahwa yang dilihat hanya kulit dipahat berbentuk orang dapat bergerak dan berbicara, yang melihat wayang umpanya orang yang bernafsu dalam keduniawiaan yang serba nikmat, mengakibatkan kegelapan hati. Ia tidak mengerti bahwa pada hakikatnya hanyalah bayangan seperti sulapan, sesungguhnya hanya semu saja”.

Berdasarkan uraian tersebut mengilustrasikan orang yang sedang menonton wayang sampai merasakan suasana dalam pergelaran wayang. Uraian tersebut mengindikasikan wayang sudah menjadi tontonan masyarakat yang digemari. Wayang sudah menyuguhkan tontonan yang atraktif dan mampu menyihir para penonton sehingga para penonton dengan khusuk menyimak pagelaran wayang. Walaupun sebenarnya yang dilihat hanya boneka yang diukir, yang digerakkan oleh sang dalang dan

---

<sup>63</sup> Fatkur Rohman Nur Awaln, "Sejarah Perkembangan Dan Perubahan Fungsi Wayang Dalam Masyarakat (History Of Development And Change Of Wayang Functions In Society)", 78.

pergelaran wayang masih sederhana dengan peralatan yang minim.

Perkembangan seni pewayangan mengalami penyesuaian paradigmatis ketika bangsa Nusantara kontak budaya dengan negara lain, ditandai masuknya kebudayaan India dengan agama Hindu di Nusantara. Wayang semakin berkembang, dengan mengambil cerita dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Mahabharata di India yang isinya berkaitan dengan dharma.

Masuknya kebudayaan Hindu ke Jawa membawa pengaruh pada pentas bayangan dan cerita wayang. Kitab Mahabharata dan Ramayana mulai dikenal setelah ditulis dalam bahasa Jawa Kuna yang bercampur dengan bahasa Sansekerta pada masa pemerintahan Dyah Balitung Raja Mataram I (892-910). Orang Jawa menerima pengaruh agama Hindu karena berprinsip toleransi agama, maka terjadi fusi kepercayaan. Pertunjukan wayang yang semula menceritakan mitos nenek moyang berganti ke epos Mahabharata dan Ramayana karena ada kesamaan, yaitu memuja dewa-dewa. Dewa-dewa pada epos Mahabharata dan Ramayana lebih konkret sehingga lebih mudah dirasakan.<sup>64</sup>

Orang Jawa mengadopsi dewa dan pahlawan India dan mencampurnya dengan mitos kuno tentang asal-usul dan kepahlawanan nenek moyang, maka terjadi akulturasi Hindu ke Jawa dan proses Jawanisasi budaya Hindu. Cerita wayang yang merupakan fusi Jawa-Hindu kemudian ditulis dan dikenal orang sebagai sumber cerita wayang, dan sering disebut sebagai wiracarita Mahabharata dan Ramayana.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Fatkur Rohman Nur Awaln, "Sejarah Perkembangan Dan Perubahan Fungsi Wayang Dalam Masyarakat (History Of Development And Change Of Wayang Functions In Society)", 79.

<sup>65</sup> Fatkur Rohman Nur Awaln, "Sejarah Perkembangan Dan Perubahan Fungsi Wayang Dalam Masyarakat (History Of Development And Change Of Wayang Functions In Society)", 80.

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah:

1. Judul Jurnal: Fungsi Kesenian Rebana Sebagai Media Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Kasus Pengusaha Rebana Muslim Grub Kecamatan Manyar Gresik) oleh Fuji Ftria Ningsih (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya) menjelaskan tentang pengaruh kesenian rebana kepada masyarakat Islam dengan adanya rumah produksi rebana dari *Muslim Group* di Kecamatan Manyar Gresik.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat Islam melalui kesenian rebana di Kecamatan Manyar Gresik tersebut banyak kegiatan dan perkumpulan Islami untuk sama-sama belajar dan menyebarkan cinta shalawat. banyak acara yang diadakan seperti rutinitas shalawat menggunakan rebana pada malam jum'at untuk menambah shilaturahim antar sesama muslim.<sup>66</sup>

2. Judul skripsi: Pengembangan Dakwah Islamiyah melalui budaya *Mappake'De Boyang* di Suku Mandar (Studi dakwah pada masyarakat Tubbi Taramanu Kabupaten Polman oleh Sumarni S. (50400113072) menjelaskan tentang bagaimana pengembangan dakwah Islamiyah melalui budaya *Mappake'de boyang* di suku Mandar dan respon masyarakat pada dakwah Islamiyah melalui budaya *Mappake'de boyang*.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengembangan dakwah Islamiyah melalui budaya *Mappake'de boyang* di suku Mandar. Pada, suatu budaya yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan budaya *mappake'de boyang* disuku mandar mengandung ajaran Islam sehingga masyarakat pada suatu pemahaman yang lebih dalam mengenal agama Islam.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Fuji Fitria Ningsih, "Fungsi Kesenian Rebana Sebagai Media Pengembangan Masyarakat Islami (Studi Kasus Pengusaha Rebana Muslim Grup Kecamatan Manyar Gresik)," *Al-Tatwir* 8, no. 1 (2021): 55–68.

<sup>67</sup> Sumarni, "Pengembangan Dakwah Islamiyah Melalui Budaya *Mappake'De Boyang* di Suku mandar (Studi Dakwah pada Masyarakat Tubi Taramanu Kabupaten Polman)" *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar (2017).

3. Judul skripsi: Wayang Sebagai Media Dakwah (Studi pada Wayang Kulit Dalam Ki Sudardi Di Desa Pringapus Semarang) oleh Yogyasmara. P. Ardhi (106051001901) menjelaskan bahasa dan nilai-nilai dakwah dalam pentas wayang kulit dalam Ki Sudardi Di Desa Pringapus Semarang, teknik penyampaian pesan-pesan dakwah dalam pentas wayang kulit dalam Ki Sudardi Di Desa Pringapus Semarang.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendekatan dakwah melalui media wayang kulit sebagai hasil dari kebudayaan mempunyai beberapa kelebihan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. *Pertama* kebudayaan wayang kulit sudah mendarah daging kepada masyarakat khususnya masyarakat Jawa Tengah, *kedua* pentas atau pertunjukan wayang kulit selalu menyampaikan nilai-nilai yang sedikit banyaknya kan memnawa pengaruh bagi para penggemarnya, *ketiga* media wayang kulit dalam pentas banyak mengandung falsafah kehidupan dan tata ilia yang luhur pada masyarakat Jawa khususnya yang berada di Pringapus Semarang.<sup>68</sup>

4. Judul skripsi: Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Konservasi Budaya Lokal Di Desa Wisata Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang oleh Tutik Sri Lestari (1201415045) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi budaya dengan pelatihan dan *sinau bareng masyarakat*.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi budaya lokal di Desa Menari Tanon terstruktur dengan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil atau keluaran yang diterima masyarakat. Serta terdapat faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi

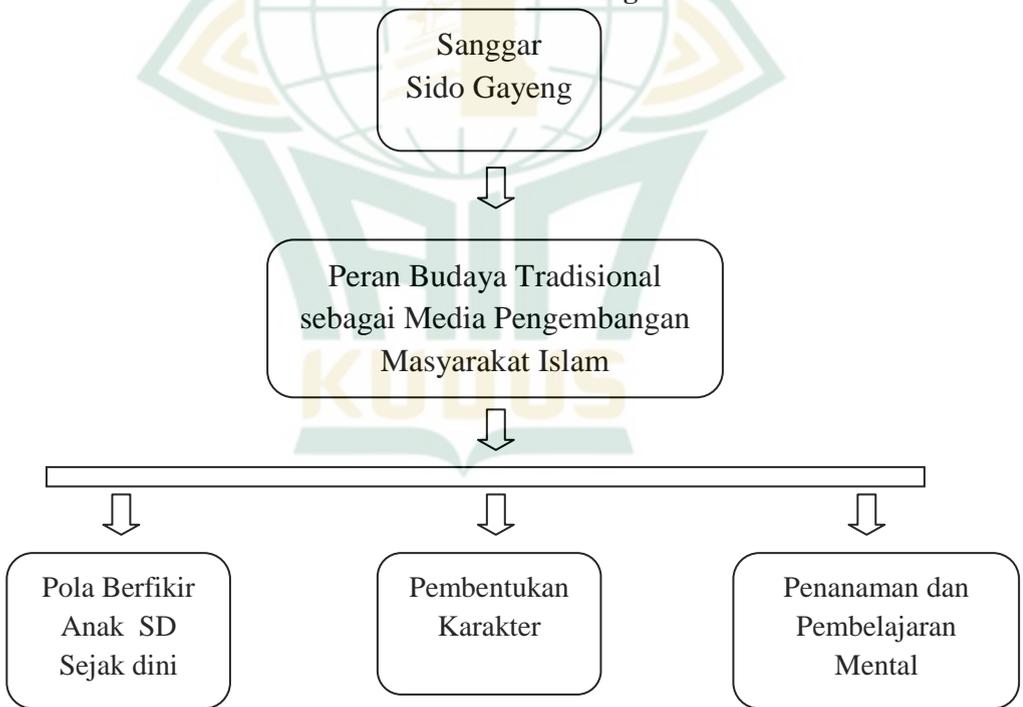
---

<sup>68</sup> Yogyasmara, "Wayang Kulit Sebagai Media Dakwah (Studi Wayang Kulit Dalam Ki Sudardi Di Desa Pringapus Semarang)" *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat berupa kebutuhan ekonomi, kesadaran masyarakat, melestarikan potensi lokal unggulan, dan ketertarikan dalam kegiatan sesuai dengan kemampuannya. Serta faktor penghambat yaitu penari tidak konsisten dalam waktu panjang, sarana dan prasarana masih belum lengkap, dan masih ada warga yang kesadarannya kurang adanya desa wisata. Pemberdayaan menjadikan masyarakat Tanon mampu berperan di Desa Menari tanon sesuai dengan kemampuannya, dan masyarakat mampu meningkatkan perekonomian.<sup>69</sup>

**C. Kerangka Berfikir**

**2.1 Gambar Kerangka Berfikir**



<sup>69</sup> Tutik Sri Lestari, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Konservasi Budaya Lokal di Desa Wisata Menari Dusun tanon Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang” *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang (2019).

Sanggar Sido Gayeng melaksanakan pengembangan masyarakat Islam melalui pembelajaran dan pemahaman serta pelatihan wayang kulit, terhadap anak-anak SD di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk pola berfikir anak seiring perkembangan zaman yang semakin modern, sehingga anak tidak lupa dengan budaya bangsa. Selain itu juga mampu membentuk karakter pada anak, tentunya karakter positif yang diambil dari kesenian wayang kulit, yang sarat akan nilai, dan norma dalam pembelajarannya. Hal ini secara tidak langsung juga mampu mempengaruhi mental anak-anak sejak dini, tentang kebudayaan masyarakat.

